

PERAN MANTAN KOMBATAN GAM DALAM SEKTOR EKONOMI PASCA KONFLIK

Vellayati Hajad¹, Ikhsan²

¹ Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar

² Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar

Email: vellayati.hajad@utu.ac.id

Email: ikhsan.baharudin@utu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berbicara tentang peran mantan kombatan GAM di sektor ekonomi politik pasca konflik Aceh (2005-2018). Mantan kombatan GAM adalah aktor ekonomi baru dalam sektor konstruksi di Aceh. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk melihat aktivitas mantan kombatan GAM di sektor ekonomi terutama di sektor bisnis konstruksi di Aceh. Narasumber penelitian ini adalah pengusaha konstruksi, pemerintah, dan tokoh masyarakat di Aceh. Penelitian ini menunjukkan bahwa mantan kombatan GAM dapat kesempatan ekonomi setelah konflik Aceh dengan menjadi rent seeker dari proyek pemerintah. Mereka bekerja dengan menggunakan jaringan GAM untuk mendapatkan sumber ekonomi melalui lobi, negosiasi, dan bahkan intimidasi untuk memenangkan tender dan mendapatkan proyek dari pemerintah. Penelitian ini berkontribusi pada studi perilaku rent seeking terutama berkaitan dengan kehadiran dan peningkatan jumlah aktor ekonomi baru dari mantan kombatan GAM sebagai hasil dari konflik Aceh.

Kata Kunci:

Aktor Ekonomi Baru, Mantan Kombatan GAM, Rent-seeking, Pasca Konflik

Abstract

This study aimed to discuss about the role of ex-Free Aceh Movement (ex-GAM) on the political economy sector after conflict in Aceh (2005-2018). The ex-GAM is new economic actors in the construction sector in Aceh. Type of data obtained in this study was qualitative. It used case study approach to see the activities of ex-GAM combatants in the economic sector, especially in the construction business sector in Aceh. The sources of this research were construction entrepreneurs, government, and community leaders in Aceh. This research shows that ex-GAM have economic opportunities after the Aceh conflict to become rent seekers from government projects. They work by using the GAM network to get economic resources through lobbying, negotiating, and even intimidating to win tenders and get projects from the government. This research contributes to the rent seeking behavior study mainly to the presence and increase in the number of new economic actors from ex-GAM as a result of the Aceh conflict.

Keywords:

New Economic Actors, Ex-GAM, Rent Seeking, Post-Conflict

Pendahuluan

Studi ini tentang relasi pengusaha dan politik di Kabupaten Aceh Barat. Pengusaha yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mantan kombatan GAM yang merupakan eks Gerakan Aceh Merdeka (eks-GAM). Mereka adalah pengusaha yang bergerak di sektor konstruksi pada masa *post-conflict*. Fenomena setelah konflik menunjukkan bahwa relasi pengusaha dan politik dapat dilihat dari dua hal pertama dengan masuknya pengusaha dalam politik dengan menjadi pejabat publik dan kedua membina hubungan baik dengan pemerintah dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, sesuai amanat MoU Helsinki dan UUPA (Undang-Undang Pemerintah Aceh) tahun 2011 mantan kombatan GAM berkesempatan untuk melebarkan eksistensinya di bidang politik dan ekonomi.

Di bidang politik, mayoritas dari eks-GAM bergabung ke dalam Partai Aceh dan akhirnya menjadi anggota legislatif atau kepala daerah di kabupaten/kota Aceh. Sedangkan sebagian mantan kombatan GAM lainnya bergerak di bidang ekonomi dengan menjadi pengusaha, terutama pengusaha di bidang konstruksi. Hal itu terjadi karena setelah kesepakatan damai antara Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tahun 2005 kegiatan ekonomi bergerak ke arah yang positif. Segala kemudahan setelah penerapan otonomi khusus itu mendorong percepatan ekonomi daerah dan pengusaha memainkan peran penting dalam proses tersebut. Seiring dengan keamanan yang dimiliki, pengusaha juga hadir di bidang politik dengan menjadi pengurus partai, simpatisan, bahkan menjadi kandidat dalam pemilihan kepala daerah. Tidak terkecuali mereka yang berasal dari eks-GAM.

Namun demikian, setelah 12 tahun kesepakatan damai (MoU) antara RI dan GAM (2005-2017), kajian tentang Aceh masih berfokus perihal konflik dan reintegrasi Aceh ke dalam negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau berbicara mengenai transformasi para eks kombatan menjadi partai politik¹ atau eks kombatan menjadi legislator. Dan masih sedikit sekali yang berbicara mengenai transformasi politik mantan kombatan GAM (eks-GAM) menjadi hubungan ekonomi di Aceh. Padahal sektor ekonomi memainkan peranan penting dalam upaya pembangunan Aceh setelah konflik. Studi ini ingin bergerak lebih jauh mengenai kehadiran aktor ekonomi baru

¹ Arya Budi, *Partai Aceh: Transformasi GAM?* (Yogyakarta: Polgov, 2012).

yang penting pascaperdamaian di Aceh, mereka adalah pengusaha, terutama pengusaha yang bergerak di sektor konstruksi di Aceh Barat.

Selama ini banyak kajian memandang negatif relasi antara pengusaha dan politik. Pengusaha dipandang sebagai *ezrats capitalist* atau kapitalis semu (Kunio, 1990) dan berpolitik hanya karena ingin menikmati rente dari penguasa dengan cara memberikan imbalan finansial serta dukungan politik². Relasi antara bisnis dan politik juga sering dibidik dengan teori *rent seeking* dan *rent seeking behavior* yaitu upaya individu atau kelompok untuk meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan regulasi pemerintah³. Penggunaan kata *rente* merujuk pada sifat pelaku bisnis yang bertujuan untuk memudahkan memperoleh keuntungan dengan menggunakan modal orang lain atau modal publik untuk keuntungan sendiri (*rent seeking behaviour*) dan menggunakan kekuasaan pemerintah untuk menghambat penawaran atau permintaan sumberdaya yang dimiliki.⁴ Sedangkan Prasad mendefinisikan *rent seeking* sebagai proses di mana individu memperoleh pendapatan tanpa secara aktual meningkatkan produktivitas, atau malah mengurangi produktivitas tersebut.⁵

Sejarah bisnis dan politik di Indonesia sendiri memperlihatkan terdapat pola patronase antara birokrat dan kliennya (dalam hal ini pengusaha) selama proses demokratisasi setelah berakhirnya Orde Baru.⁶ Menurut Winters, pengusaha di Indonesia adalah oligarki yang saling terkait atau berkelindan dan seringkali menyatu dengan pemerintahan. Kecenderungan ini semakin menguat seiring demokrasi yang semakin terkonsolidasi karena dalam demokrasi yang terkonsolidasi maka oligark akan menjadi pelaku utama dalam politik Indonesia yaitu dengan cara memiliki atau

² David C. Kang, *Crony Capitalism: Corruption and the Development in South Korea and Philippines*. (UK: Cambridge University Press, 2002). Lihat juga Mushtaq Khan, *Rent Seeking as Process* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000).

³ Jagdish N. Bhagwati & T. N. Srinivasan, "The Welfare Consequences of Directly-Unproductive Profit-Seeking (DUP) Lobbying Activities: Price Versus Quantity Distortions" dalam *Journal of International Economics*, 13(1-2, 1982), h. 33-44. Lihat juga Anne O. Krueger, "Government Failure in Development" dalam Frieden (Ed.), *Modern Political Economy an Latin Amerika: Theory and Policy*. (USA: Westview Press, 2000).

⁴ Derek J. Clark & Christian Riis, "Competition over More than One Prize" dalam *American Economic Association*, 88(1, 1998), h. 276-289.

⁵ Biman C. Prasad, "Institutional Economics and Economic Development: The Theory of Property Rights, Economic Development, Good Governance and the Environment" dalam *International Journal of Social Economics*, 30(6, 2003), h. 741-762.

⁶ Richard Robison, *Indonesia: The Rise of Capital* (Singapore: Equinox Publishing, 2009).

menguasai partai politik tujuannya adalah untuk mempertahankan kepemilikan atas kekayaan.⁷

Studi ini berbicara tentang transformasi mantan kombatan GAM dari aktor politik menjadi aktor ekonomi karena setelah konflik mengubah dirinya menjadi pengusaha konstruksi. Alasan pemilihan sektor ini adalah *pertama*, bisnis yang sangat menjanjikan dan berkembang pesat di Aceh pasca perdamaian (2005-2017). *Kedua*, perubahan sistem politik berpengaruh pada lahirnya peraturan baru yang berlaku di Aceh terutama dalam hal regulasi dan kelembagaan. Bisnis konstruksi sangat *state dependent*, sehingga pemerintah lokal sangat berpengaruh dalam penetapan siapa yang akan memperoleh tender proyek konstruksi di daerah terutama dengan kucuran dana otonomi khusus yang sangat besar yaitu 7.7 triliun pada tahun 2016 yang sebagian besar digunakan untuk sektor konstruksi dan sektor vital lainnya di Aceh. Maka sangat wajar ketika lumbung uang ini diperebutkan. Pemerintah dalam hal ini bukan saja sebagai regulator tetapi juga pemilik kekuasaan terutama setelah penerapan otonomi khusus di Aceh. Dalam hal ini Robison dan Hadiz mengatakan bahwa globalisasi juga berpengaruh pada sistem politik di Aceh. Terintegrasinya pasar lokal dan pasar dunia menjadi faktor penting dalam mendorong bisnis dan politik menjadi lebih terbuka dan transparan.⁸

Tinjauan Pustaka

Istilah rent seeking berasal dari terminologi ekonomi yaitu tindakan rasional yang dilakukan oleh individu ekonomi untuk menciptakan *cost avoiding* karena dalam konteks sistem ekonomi sejatinya *rent-seeking* selalu menjanjikan efisiensi.⁹ Dalam konteks kebijakan, praktik *rent seeking* juga akan memberikan kemudahan dan menyebabkan keuntungan bagi pihak tertentu saja atau *direct transfer of revenue* terutama apabila dikaitkan dengan kepentingan.¹⁰ Padahal, keuntungan tersebut seharusnya dinikmati oleh masyarakat sebagai bagi hasil dari transaksi politik.¹¹

⁷ Jeffrey A. Winters, *Oligarki* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011).

⁸ Vedi R. Hadiz, *Reorganizing Power in Indonesia; the Politics of Oligarchy in an Age of Markets* (London and New York: Routledge Curzon, 2004).

⁹ Anne O. Krueger, "The Political Economy of the Rent-Seeking Society" dalam *American Economic Review*, 64 (3,1974), h. 291–303.

¹⁰ Gordon Tullock, "Efficient Rent-Seeking" dalam James M. Buchanan, (Ed.), *Toward a Theory of the Rent-Seeking Society*. (Texas: A & M University Press, 1980).

¹¹ *Ibid.*

Teori *rent seeking* pada awalnya dikonstruksikan oleh para ahli ekonomi liberal yang berharap mampu menjelaskan fenomena intervensi negara yang menyebabkan biaya *rent-seeking* lebih tinggi terutama karena adanya *artificial rent* yang sengaja diciptakan oleh para pengusaha.¹² Sehingga pada akhirnya, istilah *rent-seeking* dalam pendekatan ekonomi politik berarti suatu tindakan *lobbying* yang bertujuan untuk memperoleh kemudahan khusus dari pemerintah. Model ini terutama sesuai dengan kajian di negara berkembang di mana intervensi pemerintah lebih sering dilakukan. “*the term of rent seeking refer to action aimed at obtaining special government previlage. The model has general applicability but ha special suitability for developing countries where government interventions are frequently all embracing*”.¹³ Meskipun bentuk *rents* yang dimaksud lebih merupakan *previlage* yang didapatkan dari pemerintah, secara umum *rents* bisa diartikan sebagai *income* yang lebih tinggi dari yang seharusnya diterima oleh individu atau badan usaha karena adanya kesempatan yang diberikan pemerintah.¹⁴

Berbicara mengenai *rent-seeking* maka terdapat dua mazhab besar yang berbicara. Satu, pendekatan *rent-seeking* Krueger, dan kedua pendekatan *rent-seeking* Tullock. Perbedaan yang paling prinsip antara teori *rent-seeking* Krueger dan Tullock adalah Krueger tidak menjelaskan adanya transfer yang menurut Tullock adalah *real welfare loss*. Atau dengan kata lain, Krueger tidak mengidentifikasi adanya *a direct transfer-seeking* dalam praktek *rent-seeking*. Dalam konteks kebijakan, ketika *rent seeking* dikaitkan dengan kepentingan, maka kemudahan akan menyebabkan keuntungan bagi pihak tertentu saja sehingga menghilangkan *direct transfer of revenue* yang seharusnya pada pihak yang lainnya.¹⁵ *Transfer of revenue* ini seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat sebagai bagian dari transaksi politik. Kritik terbesar Tullock adalah bahwa *income* terbesar hampir tidak pernah didistribusikan untuk masyarakat miskin.¹⁶ Padahal setiap warga negara yang memberikan suaranya (*vote*) melalui aktivitas politik (pemilu) untuk mendapatkan transfer (keuntungan) kembali.

¹² Arye L. Hillman, “Expressive Behavior in Economics and Politics” dalam *European Journal of Political Economy*, 26(1, 2010), h. 403–418.

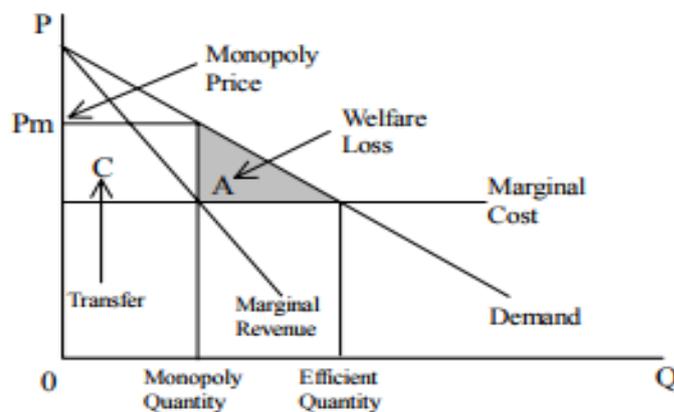
¹³ Krueger, *Op.Cit.* (1974).

¹⁴ Khan, *Op. Cit.* (2000).

¹⁵ Tullock, *Op. Cit.* (1980).

¹⁶ *Ibid.*

Gambar 1 Konsep *Rent Seeking*



Tullock bahkan secara khusus menjelaskan tentang perbedaan sudut pandang antara dirinya dan Krueger dalam dalam jurnal yang berjudul *The Origin of Rent-Seeking Concept*. Dalam teorinya Tullock menjelaskan bahwa konsep *rent-seeking* miliknya pertama kali diperkenalkan sebagai kritik terhadap kekuatan monopoli dan dikenal sebagai *monopoly previlage seeking*. Dalam analisisnya, selisih perbedaan antara harga monopoli dan harga kompetitif menghasilkan apa yang disebut sebagai *welfare loss* yang merugikan konsumen. Lambsdorff menjelaskan bahwa aktivitas politik yang menyebabkan timbulnya tekanan dan *lobby* politik dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Pada umumnya, proteksi tarif perdagangan didapatkan dengan *lobby* politik sebagai berikut. “*Generally government do not impose protective tariffs on their own. They have to be lobbied or pressures into doing so by the expenditure of resources in political activity*”.

Tabel 1 Konsep *Rent Seeking* Menurut Beberapa Ahli

	<i>Rent-seeking</i> sebagai perilaku ekonomi dalam perdagangan	<i>Rent-seeking</i> (government <i>previlage</i>) untuk kepentingan tertentu
Gordon Tullock	-	Adanya <i>direct transfer</i> sebagai bagian dari <i>social loss</i>
Anne Krueger	Dengan <i>benchmark</i> kuota. Tidak ada <i>direct transfer</i>	<i>Rent-seeking</i> dalam impor mengakibatkan harga konsumen tinggi
Anirban	<i>Rent seeking</i> sebagai kebijakan	<i>Rent seeking</i> dalam korporasi

Dasgupta	pemerintah dalam perdagangan bebas dapat dilakukan untuk infant industri	menyebabkan apa yang disebut kutukan sumber daya (<i>resource curse</i>)
Jagdis Bhagwati	Tidak ada alasan untuk meminta perlakuan khusus dalam <i>free trade</i> . <i>No such a free lunch</i>	-
Arye L. Hilman	Perilaku <i>rent-seeking</i> suatu negara tercermin dalam besaran <i>rent dissipation</i> atau sejumlah nominal yang hilang.	Perilaku <i>rent-seeking</i> selalu ada, tidak tergantung pada sistem pemerintah

Secara khusus penelitian tentang *rent seeking* ini ditulis ulang dalam buku *Public Goods, Redistribution and Rent-Seeking* (2005). Buchanan yang banyak melakukan penelitian bersama Tullock menggarisbawahi dalam *The Polluters's Profit* tentang bagaimana eksternalitas negatif menyebabkan *income* yang disebut Tullock sebagai keuntungan pemilik modal (pengusaha). Hal ini disebabkan oleh kontrol eksternalitas tidak sepenuhnya memperhitungkan biaya produksi.¹⁷ Dalam hal monopoli misalnya, jumlah *transfer of revenue* yang diterima oleh pelaku monopoli dari pembeli tidak dianggap sebagai *social cost* karena monopoli adalah bagian dari masyarakat.¹⁸

Berbicara mengenai ruang bisnis dan politik, mayoritas akademisi membidik tema ini dengan menggunakan kacamata *rent seeking*. Teori *rent seeking* disini mengacu pada hubungan pertukaran kuasa antara pemerintah daerah (birokrat dan politisi daerah) sebagai pemegang otoritas atas pemenangan tender atas proyek pemerintah dan pengusaha yang berkecimpung dalam bisnis ini.¹⁹ Penelitian ini menawarkan konsep bisnis dan politik yang berbeda dimana aktornya adalah aktor negara dan non-negara yang berasal dari eks-GAM. Politik di sini adalah pemerintah yaitu seperangkat orang yang memiliki posisi dan kewenangan untuk mengambil keputusan atas kebijakan.²⁰ Politik adalah sekelompok aktor politik khususnya eks-

¹⁷ James M. Buchanan, *Cost and Choice: An Inquiry in Economic Theory* (Chicago: Markham, 1969).

¹⁸ Tullock, *Op. Cit.* (1980).

¹⁹ Khan, *Op. Cit.* (2000).

²⁰ Stephen D. Krasner, "Comparative Politics" dalam *Approaches to the State: Alternative Conceptions and Historical Dynamics*, 16(2), 1984, h. 223–246.

GAM yang kini tergabung dalam anggota organisasi, partai politik, anggota legislatif, eksekutif, dan yudikatif di daerah. Sedangkan bisnis didefinisikan sebagai aktivitas untuk mencari keuntungan melalui produksi barang atau jasa. Kata bisnis dalam penelitian ini merujuk pada pelaku bisnis atau pengusaha terutama pengusaha yang beraliansi dengan eks-GAM.

Dalam membentuk aliansi ini seringkali menuntut pertukaran (*patron-client*) yang seringkali yang tumpang tindih dengan rent-seeking karena sama-sama menjelaskan tentang serangkaian transaksi. Hubungan patron klien adalah hubungan berulang antara patron dan klien mereka. Sejumlah fitur membedakan pertukaran patron klien dari jenis lainnya. *Pertama*, pertukaran patron klien biasanya dipersonalisasi dan melibatkan klien yang dapat diidentifikasi. Sementara selalu ada kebebasan untuk bergabung atau keluar. Bergabung dan keluar dari jaringan patron klien sering terjadi pada pasar normal. *Kedua*, pertukaran antara dua jenis agen yang berbeda, dibedakan baik berdasarkan status, kekuatan atau karakteristik lainnya.²¹ Biasanya, anggota superior disebut patron dan anggota inferior disebut klien. Namun, kekuatan atau status patron dapat bervariasi dalam jangkauan yang luas, dan perbedaan ini mungkin penting untuk memahami jenis pertukaran yang terjadi di dalam jaringan patron klien yang berbeda.

Studi tentang relasi bisnis dan politik di Indonesia menunjukkan bahwa relasi patrimonial telah muncul sejak masa Soekarno (1950-1957). Herbert Feith mengatakan bahwa relasi antara politik dan bisnis di Indonesia dimulai ketika pengusaha pribumi memperoleh lisensi bisnis bukan karena kapabilitasnya. Melalui pendekatan struktural approach, Farchan Bulkin melihat fenomena ini sebagai *peripheral capitalism structure*. Nasionalisasi perusahaan Belanda yang dilakukan oleh Soekarno pada masa pemerintahannya telah menciptakan kelas baru dari kalangan sipil dan militer untuk menjadi aktor penting dalam relasi bisnis dan politik. Sedangkan di masa Orde Baru kelas kapitalis gagal karena harus melawan kepentingan faksi politik dan birokrat. Dengan kata lain, negara membentuk jaringan patronase di dalam birokrasi dan membuat sektor bisnis menjadi *subordinate*.

²¹ Khan, *Op. Cit.* (2000).

Hampir serupa dengan pendekatan Shin. Kajian Robison adalah interaksi antara negara dan pengusaha selama Orde Baru namun dengan fokus pada militer dan birokrasi. Robison menekankan ketegangan signifikan yang terjadi antara kepentingan rezim dan pejabatnya dan kepentingan berbagai elemen kelas yang memiliki modal. Kontribusi penting dari penelitiannya terletak dalam mendemonstrasikan dan mengorientasikan dampak tekanan ini untuk perubahan ekonomi dan merestrukturisasi aliansi antara rezim dan pejabatnya dengan berbagai elemen dari kelas kapitalis serta strategi ekonomi mereka. Dalam bukunya yang lain Robison menyebut pemilik kapital sebagai oligarki.²² Sedangkan Hadiz dan Robison menjabarkan bagaimana kewenangan politik setelah kejatuhan Soeharto mengubah pengelolaan sumber-sumber ekonomi.²³ Sedangkan Winters melihat perubahan politik sebagai bentuk dari pertahanan kekayaan oligark.²⁴

Akumulasi kekayaan yang dimiliki oleh oligark dapat menjadi senjata finansial dalam berpolitik. Oligarki di Indonesia adalah oligarki penguasa kolektif elektoral yaitu oligark terkait atau berkelindan dan seringkali menyatu dengan pemerintahan. Kecenderungan ini semakin menguat seiring demokrasi yang semakin terkonsolidasi. Fenomena kemunculan *local strongmen* atau *local bossism* adalah hal yang sering terlihat.²⁵ Dalam dinamika ini para aktor politik di tingkat lokal melakukan mobilisasi politik berdasarkan identitas seperti klan, suku, agama, dan bahasa. Di lain waktu aktor politik ini juga menggunakan jaringan (birokrat dan pengusaha) dan pada akhirnya kandidat dengan *personal network* terkuat akan memenangkan pemilihan.

Politik di sini maksudnya adalah pemerintah yaitu seperangkat orang yang memiliki posisi dan kewenangan untuk mengambil keputusan atas kebijakan.²⁶ Politik adalah sekelompok aktor politik yang dalam penelitian ini adalah pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan sebuah negara. Sedangkan bisnis didefinisikan sebagai aktivitas untuk mencari keuntungan melalui produksi barang atau jasa. Kata bisnis dalam penelitian ini merujuk pada pelaku bisnis atau pengusaha. Penelitian ini berlokasi

²² Robison, *Op. Cit.* (2010).

²³ Richard Robison & Vedi R. Hadiz, *Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Market* (London and New York: Routledge, 2004).

²⁴ Winters, *Op. Cit.* (2014).

²⁵ John T. Sidel, *Capital, Coercion and Crime : Bossism in the Philippines* (Stanford : Stanford University Press, 1999.)

²⁶ Krasner, *Op. Cit.* (1984).

di Provinsi Aceh oleh karena itu pemerintah yang dimaksud adalah Pemerintah Aceh dan kata pengusaha merujuk pada pengusaha Aceh. Peneliti memilih pengusaha konstruksi sebagai pengusaha yang *state dependent* (bergantung pada negara).

Ketika pertukaran klien patron tumpang tindih dengan *rent seeking*, maka pemeriksaan terhadap jaringan patron klien dapat memberi informasi tambahan penting tentang jenis transaksi yang terjadi. Khan berpendapat bahwa besarnya *rent seeking* bergantung pada distribusi kekuasaan di dalam jaringan patron klien. Doner dan Ramsay berpendapat bahwa struktur jaringan dapat menentukan tingkat persaingan di pasar antara jaringan pesaing. Semakin banyak persaingan di antara jaringan, semakin sulit untuk menahan pendatang baru dan berdampak terhadap *output* pasar. Terkait hubungan patron klien Hutchcroft melihat tingkat harmoni dan disharmoni antara struktur kekuasaan dalam jaringan patron klien dan struktur otoritas formal struktur birokrasi akan berdampak terhadap penerapan keputusan yang koheren dan dapat diprediksi secara efisien dan dengan biaya rendah. Relasi antara bisnis dan politik pada akhirnya menciptakan banyak peluang ekonomi.²⁷ Hutchcroft melihat relasi antara negara dan bisnis ini dalam empat variasi bentuk relasi.

Gambar 2 Model Relasi Negara dan Bisnis

	State apparatuses relatively stronger, vis a vis, business interests	State apparatuses relatively weaker, vis a vis, business interests
Relatively more "rational-legal" state	Developing State (Statist Capitalism)	Regulatory State (Laissez-faire Capitalism)
Relatively more patrimonial state	Patrimonial Administrative State (Bureaucratic Capitalism)	Patrimonial Oligarchy State (Booty Capitalism)

Sumber: Hutchcroft (1998)

Relasi antara negara dan non-negara dipahami oleh Hutchcroft sebagai relasi yang dinamis yang bentuknya akan berubah seiring perubahan kekuatan aktor negara dan non-negara. Contohnya, Indonesia ketika Orde Baru adalah negara yang *patrimonial*

²⁷ Paul D. Hutchcroft, *Booty Capitalism: The Politics of Banking in the Philippines* (London: Cornell University Press, 1998).

administrative dengan pengusaha *beraucratic capitalist* karena negara lebih kuat dari kepentingan bisnis sedangkan negara karakter negara ketika Orde Baru adalah negara patrimonial. Namun, setelah Orde Baru berakhir, Indonesia berubah menjadi *patrimonial oligarchy* sekaligus *booty capitalis*. Artinya pengusaha semakin kuat pengaruhnya sedang negara masih bercorak patrimonial.

Konsep *rent-seeking* dan patron klien membantu peneliti untuk memahami aktivitas politik dan ekonomi yang dilakukan oleh eks-GAM *post-conflict*. Eks-GAM Aceh Barat saat ini telah menginfiltrasi berbagai sektor bisnis dan politik di Aceh Barat. Titik awal bagi peneliti untuk melihat aktivitas eks-GAM dalam ranah ekonomi politik. Hal tersebut karena muncul fenomena eks-GAM membentuk hubungan yang dekat dengan pemerintah dan pemerintahan dan bisnis. Mereka bekerja dalam jaringan yang telah secara sistematis dibentuk dan dibangun oleh aktor GAM pasca-konflik. Mereka tidak sekedar bertransformasi dalam bentuk partai politik lokal saja atau menjadi kontraktor seperti yang diungkapkan oleh Arya Budi dan Edward Aspinall.²⁸ Aktivitas eks-GAM pasca-konflik bergerak dalam sebuah jaringan besar GAM sehingga mereka mampu menguasai sektor politik dan ekonomi di Aceh Barat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kerja yang digunakan adalah *case study* yang dipahami sebagai upaya secara menyeluruh dan mendalam tentang karakteristik kehidupan nyata yang dapat mencakup individu, organisasi, dan sebagainya.²⁹ Di samping itu, metode ini juga secara sistematis menggali informasi tentang seseorang, setting sosial, peristiwa atau kelompok yang memungkinkan peneliti untuk mengerti bagaimana proses tersebut berlangsung dan berfungsi.³⁰ Masalah sebagai tolak ukur kemudian dicari sumber-sumber baru yang bertujuan menemukan kaitan-kaitan yang dapat diubah menjadi hipotesis. Penelitian eksploratif juga bertujuan untuk menggambarkan secara lebih rinci tentang status keadaan fenomena sosial yang melibatkan manusia sebagai instrumen pengumpulan data.

²⁸ Edward Aspinall, "Combatants To Contractors: The Political Economy of Peace in Aceh" dalam *Indonesia*, 87 (April 2009), h. 1–34. Lihat juga A. Budi, Op. Cit. (2012).

²⁹ Robert K. Yin, *Case Study Research: Design and Methods* (London: SAGE, 2003).

³⁰ Bruce L. Berg, *Qualitative Research Methods for the Social Sciences* (London: Pearson, 2004).

Penelitian ini membatasi unit analisis hanya pada fokus aktivitas eks-GAM pasca konflik dalam ruang ekonomi dan politik. Fokus analisis adalah mantan kombatan GAM (eks-GAM) wilayah Aceh Barat. Masyarakat yang tercakup dalam wilayah ini juga bagian dari fokus yang akan dianalisis untuk melihat peristiwa secara riil dalam konteks persoalan penelitian. Penelitian fokus di Kabupaten Aceh Barat karena daerah ini bukan merupakan daerah basis GAM ketika konflik berlangsung. Di samping itu, wilayah ini merupakan daerah yang dianggap cukup mapan karena masyarakat memiliki pendidikan yang memadai dan karakteristik masyarakat yang pluralis di mana juga sektor perdagangan barang dan jasa menjadi jantung aktivitas kabupaten.

Dalam penelitian ini, proses pengumpulan dan memperoleh data dilakukan dengan cara diantaranya yaitu (1) telaah kepustakaan. Teknik ini dipakai untuk memperoleh informasi yang lengkap dan menyeluruh mengenai aktivitas eks-GAM di sektor ekonomi dan politik pasca konflik. Untuk memperoleh gambaran data yang komprehensif tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah ini, maka telaah terhadap berbagai sumber mutlak diperlukan. Dokumen yang ditelaah berupa buku, artikel, majalah, koran, undang-undang, dan Qanun. Upaya ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui aktivitas eks-GAM dalam ruang ekonomi dan politik pasca konflik di Aceh Barat. (2) Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*). Wawancara adalah tanya jawab antara peneliti dengan reponden untuk memperoleh keterangan-keterangan yang diperlukan. Wawancara dilakukan untuk mengecek kembali serta untuk memperoleh data akurat dan akuntabel yang disampaikan para informan kunci ketika saat wawancara.

Wawancara digunakan untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang fenomena aktivitas ekonomi mantan kombatan GAM dalam ruang ekonomi politik pasca konflik. Wawancara yang dilakukan bersifat terbuka, dimana tidak tertutup kemungkinan untuk memunculkan pertanyaan baru yang berkembang dari jawaban narasumber. Narasumber utama dalam penelitian ini adalah pengusaha konstruksi, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat. Pemilihan narasumber utama tersebut didasarkan pada orang-orang yang berkompeten baik secara organisasi maupun individu dalam mendukung penelitian ini. Observasi merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif di mana peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-

hari dengan orang yang sedang diamati dan digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan oleh sumber data. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap dan tajam. Model pengamatan langsung dilakukan untuk memperoleh berbagai gambaran kejadian, peristiwa, keadaan dan aktivitas eks-GAM dalam ruang ekonomi dan politik pasca konflik.

Hasil dan Pembahasan

Mantan kombatan GAM dan “Godaan” Sektor Konstruksi

Studi terdahulu menunjukkan bahwa para pengusaha masuk dalam lingkaran kekuasaan dengan tujuan untuk memperoleh kemudahan dari pemerintah. Di Korea Selatan misalnya, para *chaebol* membangun perusahaan multinasional mereka dengan sokongan berupa konsesi dan lisensi dari pemerintah sehingga membentuk *cozy relationship* dengan penguasa.³¹ Atau seperti yang terjadi di Filipina, pengusaha menjadikan presiden sebagai patron sehingga pengusaha mampu menguasai ranah politik dan bisnis sekaligus, perpaduan antara negara yang masih patrimonial dan kapitalis yang kuat disebut oleh Hutchcroft sebagai *booty capitalism*.³²

Di Indonesia riset yang dilakukan Yoshihara Kunio³³ dan Robinson dan Hadiz³⁴ mengkonfirmasi hal tersebut. Pengusaha adalah pemburu rente dari hasil *kongkalikong* kepentingan dengan penguasa. Seringkali pengusaha jenis ini akhirnya tertarik untuk berpolitik, baik sebagai anggota partai, anggota legislatif atau kepala daerah. Bukan hanya masuk, melainkan mengendalikan karena berada di pucuk pimpinan partai politik. di Indonesia, pengusaha yang menjadi pemburu rente menjalin hubungan baik dengan pemerintah. Mereka memanfaatkan proteksi lisensi bisnis, atau monopoli atas kegiatan bisnis dengan persetujuan pemerintah. Kunio Yushihara menyebut pengusaha yang mengandalkan *previlage* dari pemerintah ini sebagai kapitalis semu (*ezraat capitalist*).³⁵

Fenomena maraknya eks-GAM tergiur untuk menekuni bisnis konstruksi tidak terlepas dari besarnya dana yang berputar di Aceh khususnya dalam hal pembangunan

³¹ Kang, *Op. Cit.* (2002).

³² Hutchcroft, *Op. Cit.* (1998).

³³ Yoshihara Kunio, *Kapitalisme Semu Asia Tenggara* (Jakarta: LP3ES, 1990).

³⁴ Robinson & Hadiz, *Op. Cit.* (2004).

³⁵ Kunio, *Op.Cit.* (1990).

infrastruktur. Setelah tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004, jumlah uang yang beredar di Aceh sangat besar. Menurut Lembaga Pembangunan Jasa Konstruksi (LPJK) pada tahun 2007 beredar dana dari APBN, APBD, dan BRR sekitar tiga puluh triliun rupiah dan 40 persennya (dua belas triliun rupiah) dialokasikan untuk membayar kegiatan konstruksi. Maka tidak heran jika sektor konstruksi menjadi magnet tersendiri bagi eks-GAM yang sudah terlampaui lama dalam perang gerilya dan kini memperoleh kesempatan untuk mengumpulkan pundi-pundi uang dari kesempatan yang ada.

Keterlibatan pengusaha dalam politik adalah perluasan kekuasaan yang dimiliki oleh pengusaha dan menjadikan bisnis konstruksi menjanjikan keuntungan yang besar bagi pengusaha. Kebangkitan pengusaha dalam dunia politik dengan kompleksitas kapital yang dimilikinya menjadikan dunia politik medan pertemuan “kekuatan” untuk memperebutkan kekuasaan struktural dan menduduki posisi-posisi strategis untuk mengawal kebijakan-kebijakan pro-pengusaha. Tujuan utamanya adalah demi “keamanan” atas usaha-usaha yang ditekuni. Di Kabupaten Aceh Barat misalnya dengan melibatkan diri dalam politik, mereka berusaha menggunakan kewenangannya untuk mengontrol sumber daya sekaligus melindungi unit usaha yang mereka miliki. Perilaku pengusaha jenis ini semakin marak ditemukan di Aceh setelah masa perdamaian antara NKRI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), terutama pengusaha di Provinsi Aceh di mana Partai Aceh berhasil memenangkan proses pemilihan.

Wawancara dengan mantan kombatan GAM yang saat ini telah menjadi pengusaha di sektor konstruksi, Maturizi (05 Maret 2019) mengkonfirmasi hal tersebut. *“Perusahaan tambang yang dibuka di Aceh ini harus memberikan pekerjaan (proyek) membangun jalan kepada kepada kita orang Aceh. Jika tidak maka tidak perlu mendirikan perusahaan di sini.”*³⁶

Hal tersebut juga diperkuat oleh Tgk. Banta Lidani (07 Maret 2019) yang mengatakan bahwa dia bersama pasukannya yang merupakan mantan kombatan GAM saat ini telah memiliki pekerjaan karena jaringan GAM yang mereka miliki. *“Alhamdulillah, saya dan semua pasukan saya yang berjuang dulu sekarang sudah memiliki pekerjaan di bidang konstruksi.”*³⁷

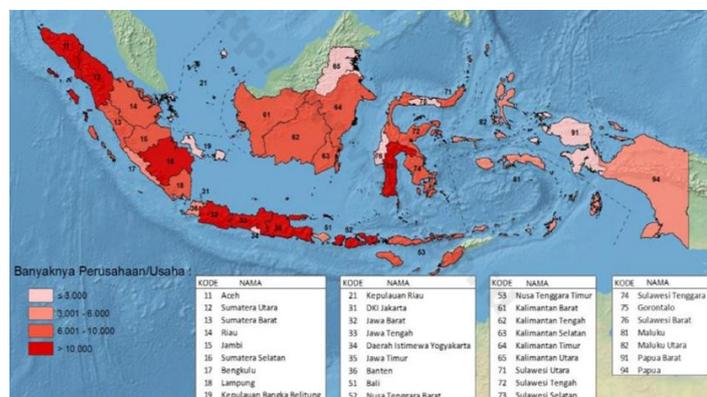
³⁶ Maturizi, wawancara pada tanggal 05 Maret 2019.

³⁷ Tgk. Banta Lidani, wawancara pada tanggal 07 Maret 2019.

Sektor konstruksi sendiri adalah pemberi sumbangan terbesar bagi *Gross Domestic Product* (GDP) perekonomian di Indonesia, termasuk bagi perekonomian Aceh karena memiliki peran sangat besar dalam hal penyerapan tenaga kerja, jangkauan rantai pasok yang luas sekaligus sebagai mobilisator pertumbuhan produk lokal dan nasional. Sehingga tidak mengherankan jika sektor konstruksi ini disebut-sebut sebagai *engine of growth* atau artinya kemajuan suatu daerah dapat diukur oleh keberhasilan dalam penyelenggaraan sektor konstruksi khususnya di bidang infrastruktur. Bahkan dalam Antara Aceh tanggal 6 November 2017 Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan bahwa sektor konstruksi adalah sektor yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dapat terjadi karena sektor konstruksi menstimulasi tumbuh dan berkembangnya sektor ekonomi lain.

Dalam buku *Konstruksi dalam Angka* yang diterbitkan oleh BPS pada tahun 2016, perusahaan konstruksi di Aceh terbilang cukup banyak bila mengingat Aceh adalah propinsi yang relatif tidak luas. Berdasarkan data BPS, Aceh memiliki perusahaan/usaha konstruksi mencapai lebih dari 10.000 usaha, bahkan mendekati perusahaan/usaha konstruksi yang dimiliki oleh Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Perusahaan/usaha konstruksi di Aceh adalah 12 perusahaan besar; 907 perusahaan menengah, dan 4674 perusahaan kecil, ditambah ribuan usaha konstruksi perorangan. Untuk memudahkan, berikut ditampilkan peta yang konstruksi Indonesia dengan propinsi yang berwarna merah sebagai propinsi yang memiliki perusahaan/usaha konstruksi terbanyak.

Gambar 3 Peta Perusahaan Konstruksi di Indonesia



Sumber : Konstruksi dalam Angka BPS 2016

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Barat, salah satu kabupaten di pesisir barat Aceh. Meskipun bukan basis atau tempat lahirnya GAM seperti Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur, namun GAM Aceh Barat tidak bisa dianggap remeh. Selama konflik mereka bekerja dengan sistem hierarkis yang terdiri dari Panglima Wilayah, Panglima Daerah, dan Panglima Sago yang membawahi ratusan prajurit. Setelah konflik berakhir, struktur ini tetap dipertahankan ke dalam bentuk baru salah satunya melalui Komisi Peralihan Aceh (KPA) dan Partai Aceh (PA). Dalam KPA Aceh Barat, struktur organisasi ini juga sesuai dengan struktur GAM wilayah Aceh Barat dulu yaitu terdiri dari 500 orang. Hanya saja dalam keanggotaannya, terdapat klasifikasi yang dibentuk oleh sesama eks-GAM *setelah post-conflict* yaitu klasifikasi A dan B. Klasifikasi A KPA berjumlah 186 orang yaitu GAM yang hingga akhir perjuangan tidak menyerahkan diri pada NKRI. Sedangkan klasifikasi B KPA terdiri dari 314 orang yang dulunya GAM namun menyerah sebelum masa perdamaian. Perbedaan klasifikasi ini pada akhirnya ikut mempengaruhi jabatan dan posisi yang diperoleh eks-GAM dalam KPA, Partai Aceh, hingga bahkan mempengaruhi peluang dan kesempatan bisnis khususnya dalam rangka besaran proyek konstruksi yang diperoleh.

Hal yang unik di Aceh Barat adalah 93 orang eks-GAM yang bergabung di dalam KPA juga terdaftar sebagai anggota Partai Aceh dan tidak ada tumpang tindih jabatan antara KPA dan Partai Aceh. Saat ini anggota DPRK yang berasal dari Partai Aceh berjumlah lima orang dan salah seorang diantaranya yaitu Samsibarmi menjadi Wakil Ketua DPRK Aceh Barat periode 2014-2019. Meskipun demikian, proses penetapan penerima tender berbagai proyek di tingkat kabupaten ditentukan oleh bupati ketimbang anggota legislatif. Istilah *proyek terletak diujung pulpen pak bupati* benar adanya. Sehingga pada akhirnya, eks-GAM mulai dari panglima wilayah, panglima daerah, dan panglima sago beserta anggota di bawah biasanya menargetkan kontrak yang lebih kecil, yang dapat dialokasikan oleh kabupaten dengan cara penunjukan langsung. Meskipun sejak 2018 terjadi sedikit perubahan, di mana penunjukan langsung untuk proyek konstruksi yang bersumber dari dana otonomi khusus merupakan wewenang Gubernur Aceh.

Sehingga tidak heran pemilihan Bupati Aceh Barat tahun 2017 lalu berlangsung sangat sengit. Seluruh jaringan GAM kembali digunakan untuk memenangkan pasangan Ramli MS dan Banta Puteh Syam yang diusung oleh Partai Aceh. Fokus operasi

jaringan ini adalah wilayah pinggiran Kabupaten Aceh Barat yang masyarakatnya merupakan pendukung fanatik GAM sejak dulu. Gabungan antara pemilih loyal dan tim sukses eks-GAM yang militan menjadikan Ramli, MS sebagai calon yang diusung oleh Partai Aceh dan meraup 50% suara atau sekitar 52.538 suara sah. Muara dari dukungan dan penggunaan jaringan eks-GAM ini adalah memenangkan calon bupati dari Partai Aceh karena bupati adalah pemilik dan pemberi/pembagi proyek konstruksi yang sah di mata pengusaha eks-GAM. Usaha mengusung pasangan Ramli MS dan Banta Puteh bukan hanya sekedar urusan politis, hal ini juga menyangkut urusan bisnis apalagi lawan terkuat yaitu T. Alaidinsyah (Tito) adalah *incumbent* yang juga merupakan pengusaha konstruksi.

Keberhasilan eks-GAM memenangkan pertarungan dalam pemilihan Bupati Aceh Barat membuka akses bagi eks-GAM untuk masuk dalam pusaran kekuasaan di Aceh Barat. Di mana bupati dan anggota legislatifnya berasal dari Partai Aceh dan berjejaring dengan GAM lama. Sehingga, mereka dapat memobilisasi orang-orangnya (termasuk dalam hal ini bupati) untuk memasukkan nama mereka ke dalam daftar penerima proyek di sektor konstruksi. Pemerintah dapat mengarahkan sejumlah besar proyek berskala kecil (terutama yang bisa diberikan oleh penunjukan langsung) kepada pengusaha eks-GAM. Meskipun, mereka juga mengetahui bahwa besaran proyek yang diterima biasanya sesuai posisi atau jabatan dalam struktur GAM ketika masa perjuangan dulu (hierarkis). Panglima wilayah akan memperoleh nilai proyek yang lebih besar daripada Panglima Daerah, dan Panglima Daerah memperoleh nilai proyek yang lebih besar dari Panglima Sago dan begitu seterusnya.

Sehingga pada akhirnya, terdapat beberapa tingkatan dalam proses *lobbying* untuk mendapatkan celah usaha yang saat ini dipenuhi oleh sesama eks-GAM dengan mendekati atau dengan mengintimidasi. Ketatnya persaingan terutama diantara eks-GAM sendiri dan minimnya modal yang dimiliki menjadikan banyak eks-GAM yang bergerak di bidang konstruksi terbagi menjadi empat jenis pengusaha konstruksi. *Pertama*, pengusaha yang memiliki modal dan memiliki Persekutuan Komanditer (CV), *kedua*, pengusaha yang memiliki modal tetapi tidak memiliki CV, *ketiga* pengusaha yang tidak memiliki modal namun memiliki CV, dan *keempat* pengusaha yang tidak memiliki modal dan tidak memiliki CV. Pengusaha jenis keempat ini yang paling banyak ditemui di Aceh Barat. Mereka hanya menjadi perantara atau broker dalam

kegiatan bisnis ini. Mereka menjadikan modal sosial berupa jaringan dan sisa pengaruh mereka di GAM dulu untuk mendapatkan sejumlah proyek yang nantinya mereka jual kembali kepada pihak lain. Padahal mereka tidak memiliki modal dan tidak memiliki CV untuk memperoleh proyek tersebut.

Tabel 2 Tipe Kontraktor Aceh yang berafiliasi dengan Mantan kombatan GAM

Tipe	Kontraktor	Keterangan
1.	Memiliki modal dan memiliki Persekutuan Komanditer (CV)	Mengerjakan sendiri proyek dari pemerintah
2.	Memiliki modal tetapi tidak memiliki CV	Meminjam CV milik orang lain dan mengerjakan sendiri proyek dari pemerintah
3.	Tidak memiliki modal namun memiliki CV	Meminjamkan CV pada orang lain dan memperoleh bayaran untuk hal tersebut
4.	Tidak memiliki modal dan tidak memiliki CV	Menjadi mediator (broker) antara pemerintah, pemilik CV, pemilik modal, dan pelaksana proyek pemerintah

Perilaku bisnis yang dilakukan oleh pengusaha eks-GAM ini serupa seperti yang dikatakan oleh Yushihara sebagai *ezraat capitalist* atau kapitalis semu. Bedanya, perilaku ekonomi dalam penelitian ini dilakukan oleh kelompok yang dulunya anti terhadap negara (GAM) dan ingin memisahkan diri dari NKRI namun kini setelah konflik berakhir malah memperebutkan ceruk ekonomi yang bersumber dari negara. Terjadi pergeseran interaksi interaksi disini, jika sebelumnya konfrontatif menjadi akomodatif terhadap negara.

Perilaku pengusaha jenis ini (kapitalis semu) semakin marak ditemukan di Aceh setelah konflik berakhir terutama pengusaha di Kabupaten Aceh Barat. Namun uniknya, pengusaha semu dalam studi ini bukan seperti yang dibayangkan oleh Kunio³⁸ atau seperti yang ditulis oleh Edward Aspinall tentang transformasi kombatan menjadi

³⁸ Kunio, *Op. Cit.* (1990).

kontraktor yaitu Eks-GAM bergantung pada proyek yang berlimpah di tengah besarnya dana otonomi khusus di Aceh³⁹. Studi ini melihat bagaimana eks-GAM hadir dan berelasi dengan negara untuk mendapatkan keuntungan ekonomi melalui proyek milik negara namun bukan untuk dirinya sendiri, mereka hanya bertindak sebagai broker atau penghubung antara negara dan pembeli proyek dan mereka mendapatkan keuntungan sekitar 10-15% dari total anggaran proyek secara tunai bahkan sebelum proyek berjalan.

Kesimpulan

Keterlibatan *mantan kombatan GAM* sebagai aktor ekonomi baru dalam sektor konstruksi di Aceh pascakonflik dapat dilihat sebagai perluasan kekuasaan politik. Perluasan kekuasaan yang dimiliki oleh mantan kombatan GAM yang merupakan pengusaha baru menjadikan mereka pemilik dua kekuasaan penting di Aceh saat ini yaitu kekuasaan ekonomi dan politik. Menguasai sektor konstruksi berarti menguasai sumber ekonomi penting di Aceh, terutama setelah diberlakukannya otonomi khusus yang mensyaratkan pemberian dana otonomi khusus oleh Pemerintah Pusat yang tentu saja akhirnya memberikan banyak keuntungan bagi bagi pengusaha lokal. Kebangkitan pengusaha yang berasal dari kalangan mantan kombatan GAM dalam sector ekonomi dengan kompleksitas dan segregasi politik lokal yang panas, diantaranya berupa perebutan kekuasaan oleh sesama partai lokal dan partai nasional, atau bahkan sesama mantan pejuang eks-GAM menjadi sesuatu yang menarik untuk dilihat. Bahwa ternyata arena politik bukan lagi menjadi satu-satunya arena pertarungan, mantan kombatan GAM bertarung secara sengit justru di arena ekonomi khususnya konstruksi.

Berdasarkan penelitian ternyata semakin besar proyek konstruksi yang diperoleh maka semakin mengukuhkan kekuasaan yang dimiliki oleh mantan kombatan GAM tersebut. Sehingga, bukan hal yang mengherankan apabila garis perjuangan mereka juga sudah bergeser dari politik menjadi ekonomi. Meskipun tetap saja, jaringan politik sebagai sesama GAM. Atau dengan bahasa sederhana, politik adalah jembatan bagi penguasaan ekonomi. Mantan kombatan GAM masuk dunia politik dengan kompleksitas kapital yang dimilikinya menjadikan dunia politik medan pertemuan “kekuatan” untuk memperebutkan kekuasaan struktural dan menduduki

³⁹ Aspinall, *Op. Cit.* (2009).

posisi-posisi strategis dengan tujuan untuk mengawal kebijakan-kebijakan pro-pengusaha. Tujuan utamanya adalah demi “keamanan” atas usaha-usaha yang ditekuni. Dengan melibatkan diri dalam politik, mereka berusaha menggunakan kewenangannya untuk mengontrol sumber daya sekaligus melindungi unit usaha yang mereka miliki. Perilaku jenis ini menunjukkan mantan kombatan GAM berhasil memenangkan dua pertarungan sekaligus yaitu pertarungan politik dan ekonomi. Dalam politik mereka berhasil menduduki jabatan Wali Nanggroe, kepala daerah, lembaga legislatif, bahkan hingga level terkecil Keuchik (kepala desa). Dengan menguasai jabatan publik tersebut mantan kombatan GAM memiliki tujuan akhir untuk menguasai ekonomi khususnya di sektor konstruksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, Edward. “Combatants To Contractors: The Political Economy of Peace in Aceh” dalam *Indonesia*, 87 (April 2009), h. 1–34.
- Berg, Bruce L. *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*. London: Pearson, 2004.
- Bhagwati, Jagdish N. & T. N. Srinivasan. “The Welfare Consequences of Directly-Unproductive Profit-Seeking (DUP) Lobbying Activities: Price Versus Quantity Distortions” dalam *Journal of International Economics*, 13(1–2, 1982), h. 33–44.
- Buchanan, James M. *Cost and Choice: An Inquiry in Economic Theory*. Chicago: Markham, 1969.
- Budi, Arya. *Partai Aceh: Transformasi GAM?*. Yogyakarta: Polgov, 2012.
- Clark, Derek J. & Christian Riis. “Competition over More than One Prize” dalam *American Economic Association*, 88 (1, 1998).
- Hadiz, Vedi R. *Reorganizing Power in Indonesia; the Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. (London and New York: Routledge Curzon, 2004.
- Hillman, Arye L. “Expressive Behavior in Economics and Politics” dalam *European Journal of Political Economy*, 26(1, 2010), h. 403–418.
- Hutchcroft, Paul D. *Booty Capitalism: The Politics of Banking in the Philippines*. London: Cornell University Press, 1998.

- Kang, David C. *Crony Capitalism: Corruption and the Development in South Korea and Philipines*. UK: Cambridge University Press, 2002.
- Khan, Mushtaq. *Rent Seeking as Process*. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- Krasner, Stephen D. “Comparative Politics” dalam *Approaches to the State: Alternative Conceptions and Historical Dynamics*, 16(2, 1984), h. 223–246.
- Krueger, Anne O. “Government Failure in Development” dalam Frieden (Ed.), *Modern Political Economy an Latin Amerika: Theory and Policy*. USA: Westview Press, 2000.
- Krueger, Anne O. “The Political Economy of the Rent-Seeking Society” dalam *American Economic Review*, 64 (3,1974), h. 291–303.
- Kunio, Yoshihara. *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Maturizi, wawancara pada tanggal 05 Maret 2019.
- Prasad, Biman C. “Institutional Economics and Economic Development: The Theory of Property Rights, Economic Development, Good Governance and the Environment” dalam *International Journal of Social Economics*, 30(6, 2003).
- Robison, Richard. *Indonesia: The Rise of Capital*. Singapore: Equinox Publishing, 2009.
- Robison, Richard & Vedi R. Hadiz. *Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Market*. London and New York: Routledge, 2004.
- Sidel, John T. *Capital, Coercion and Crime : Bossism in the Philippines*. Stanford : Stanford University Press, 1999.
- Tgk. Banta Lidan, wawancara pada tanggal 07 Maret 2019.
- Tullock, Gordon. “Efficient Rent-Seeking” dalam James M. Buchanan (Ed.). *Toward a Theory of the Rent-Seeking Society*. Texas: A & M University Press, 1980.
- Winters, Jeffrey A. *Oligarki*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Yin, Robert K. *Case Study Research: Design and Methods*. London: SAGE, 2003.